

BAB III

PERKEMBANGAN TPP & DINAMIKA KEIKUTSERTAAN AMERIKA SERIKAT DI TPP

Pada bab tiga ini, penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai apa itu negosiasi TPP (*Trans-Pacific Partnership*) dan bergabungnya Amerika Serikat dalam negosiasi tersebut pada masa pemerintahan presiden Barack Obama. Untuk mengetahui bagaimana negosiasi TPP itu sendiri, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya negosiasi TPP, siapa saja negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan TPP, tujuan dibentuknya negosiasi TPP, dan juga apa saja program-program yang akan dijalankan dalam negosiasi ini. Setelah membicarakan mengenai negosiasi TPP secara detail, kemudian penulis akan membahas mengenai dinamika keikutsertaan Amerika Serikat dalam negosiasi TPP ini. Dimana Amerika Serikat resmi mulai memutuskan untuk bergabung dalam TPP pada masa pemerintahan presiden Barack Obama di tahun 2008. Penulis akan menjelaskan bagaimana proses bergabungnya Amerika Serikat dalam negosiasi TPP dan kepentingan apa yang dimiliki Obama dibalik keputusan tersebut. Kemudian pada saat Amerika Serikat mengalami pergantian kepemimpinan dibawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari negosiasi ini. Pada bab ini juga akan dibahas apakah alasan dibalik penarikan diri tersebut, dan bagaimana dampaknya bagi negosiasi TPP kedepannya.

A. Perkembangan TPP (*Trans-Pacific Partnership*)

Perkembangan negosiasi *Trans-Pacific Partnership* ini akan dimulai dari penjelasan sejarah awal terbentuknya negosiasi ini, bagaimana ide kerjasama ini bisa teretuskan. Negosiasi TPP ini tentunya tidak begitu saja terbentuk, dibutuhkan peran dari negara-negara untuk mempersatukan keinginan yang sama menjadi sebuah perjanjian kerjasama yang menguntungkan diantara sesama anggotanya. Pembentukan TPP ini juga

mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dengan bidang-bidang kerjasama yang beragam yang diatur di dalamnya.

1. Latar Belakang Berdirinya TPP

TPP merupakan perjanjian kerjasama multilateral yang beranggotakan 12 negara dalam bidang perdagangan. Awal tercetusnya pembentukan TPP adalah ketika KTT APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) yang berlangsung pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko. Perundingan ini dilakukan oleh Presiden Chili Ricardo Lagos, Perdana Menteri Helen Clarck dari Selandia Baru, dan Goh Chok Tong Perdana Menteri dari Singapura yang tergabung dalam P-3 (*Pacific Three*). Menurut Perdana Menteri dari Selandia Baru, mereka ingin membangun kerjasama yang luas dan berorientasi kedepan dengan tolak ukur yang berkualitas tinggi pada aturan perdagangan, serta mempromosikan liberalisasi perdagangan dan memfasilitasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pada tahun 2005 Brunei Darussalam bergabung sehingga menjadi P-4 (*Pacific Four*) atau disebut *The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* dan mulai aktif pada 2006, namun masih ada beberapa aturan mengenai investasi dan keuangan yang ditangguhkan selama dua tahun (Rajamoorthy, *The Origins and Evolution of the Trans-Pacific Partnership (TPP)*, 2013). Lebih jelasnya negosiasi ini mulai efektif pada 28 Mei 2006 untuk negara Selandia Baru dan Singapura, Chili pada 8 November 2006, dan Brunei Darussalam pada 1 Juli 2008 (Huang, 2012).

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP) merupakan perjanjian perdagangan yang laus antara empat negara tersebut yang mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa, kekayaan intelektual, hambatan teknis untuk perdagangan, dan lain sebagainya, termasuk

pengurangan tarif untuk negara anggota sebesar 90 persen dari semua tarif pada 1 Januari 2006 dan pengurangan semua tarif pada perdagangan ke nol pada tahun 2015. Keempat negara tersebut merupakan negara yang tidak terlalu besar sehingga tidak dapat menarik perhatian dunia mengenai perdagangan, karena pada saat itu fokus perhatian perdagangan dunia sedang pada agenda *The Doha Round*. Akan tetapi ketika *The Doha Round* tidak lagi berjalan mulus karena kekuatan Tiongkok lebih mendominasi pada perdagangan di beberapa kawasan Asia, Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan perbincangan dengan negara-negara anggota P-4 mengenai liberalisasi perdagangan dan layanan keuangan pada Februari 2008 dibawah pemerintahan Presiden Bush, dan kemudian bergabung ke dalam negosiasi P-4 ini pada September 2008. Pada November 2009 Amerika Serikat mengambil alih negosiasi dengan mengganti *The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* menjadi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan mempromosikannya ke negara-negara di dunia yang dilakukan dibawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Amerika Serikat mengundang negara-negara seperti Australia, Peru, Vietnam untuk bergabung kedalam negosiasi TPP ini. Anggota TPP semakin bertambah dari yang hanya empat negara menjadi dua belas negara anggota dengan Jepang sebagai negara anggota yang terakhir bergabung pada tahun 2013. Amerika Serikat dan Jepang dapat dikatakan sebagai dua negara yang bermain paling besar dalam negosiasi TPP ini, karena dua negara ini merupakan negara eksportir terbesar di dunia.

TPP merupakan perjanjian yang dikenal dengan istilah “*docking agreement*”, yang berarti adalah perjanjian kerjasama ini dapat diikuti oleh negara-negara lain (Stamoulis, *Trading Away the Future: An*

Analysis of the Trans-Pacific Partnership, 2013). Selain kedua belas negara anggota tetap dari TPP tersebut, negara-negara lain dapat juga bergabung dalam negosiasi ini. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Thailand mengumumkan bahwa ia sedang melakukan perundingan dengan Presiden Barack Obama mengenai negosiasi perjanjian TPP, Filipina mengumumkan “roadmap” untuk bergabung dengan TPP, Korea Selatan telah menerima tawaran dari pejabat Perdagangan Amerika Serikat, dan pemerintahan Tiongkok telah mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan negosiasi TPP ini (*ibid*). Proposal final TPP telah ditanda tangani pada 4 Februari 2016 di Auckland, Selandia Baru dimana sebelumnya telah mencapai perjanjian final pada 5 Oktober 2015. Meskipun sampai saat ini negosiasi TPP ini belum juga efektif berjalan karena belum keseluruhan negara anggota meratifikasi perjanjian kerjasama ini. Pada tahun 2018 ini, Amerika Serikat resmi menarik diri dari negosiasi TPP ini, yang kemudian menjadikan TPP yang semula beranggotakan dua belas negara menjadi sebelas negara anggota dengan berganti nama menjadi *The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).

2. Anggota TPP

Negara-negara anggota negosiasi TPP ini semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Semula hanya ada empat negara tetap sebagai pendiri awal negosiasi yang kemudian bertambah setiap tahunnya menjadi 12 negara anggota tetap. Masing-masing negara anggota yang bergabung dalam TPP mempunyai peran yang berbeda dalam negosiasi ini. Terdapat beberapa negara besar yang memberikan pengaruh bagi negara-negara lain dalam keikutsertaannya di negosiasi ini. Adapaun kedua

belas negara anggota negosiasi TPP adalah Selandia Baru, Chili, Singapura, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Vietnam, Malaysia, Chili, Meksiko, Australia, Jepang, dan Peru. Selandia Baru memiliki peran dan kekuasaan yang cukup besar dalam negosiasi ini, dimana Selandia Baru merupakan tempat penandatanganan perjanjian TPP tepatnya di daerah Auckland dan juga Selandia Baru merupakan *depository* perjanjian. Oleh karena itu, jika negara-negara anggota memiliki kepentingan administrasi dengan negosiasi TPP dapat langsung berhubungan dengan Selandia Baru. Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan negosiasi TPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Negara-Negara Anggota Negosiasi TPP

No	Negara	Bergabung dalam Negosiasi	Tanda Tangan Perjanjian	Ratifikasi Perjanjian
1.	Selandia Baru	2002	4 Februari 2016	11 Mei 2017
2.	Singapura	2002	4 Februari 2016	-
3.	Chili	2002	4 Februari 2016	-
4.	Brunei Darussalam	2005	4 Februari 2016	-
5.	Amerika Serikat	2008	4 Februari 2016	-
6.	Australia	2008	4 Februari 2016	-
7.	Peru	2008	4 Februari 2016	-

No	Negara	Bergabung dalam Negosiasi	Tanda Tangan Perjanjian	Ratifikasi Perjanjian
8.	Vietnam	2008	4 Februari 2016	-
9.	Malaysia	2010	4 Februari 2016	-
10.	Meksiko	2012	4 Februari 2016	25 April 2018
11.	Kanada	2012	4 Februari 2016	-
12.	Jepang	2013	4 Februari 2016	20 Januari 2017

Dari Tabel 3.1 dapat kita uraikan bahwa setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan cukup lama, akhirnya kedua belas negara anggota melakukan penandatanganan final perjanjian pada 4 Februari 2016 . Dalam negosiasi TPP ini baru ada tiga negara yang melakukan ratifikasi perjanjian yaitu negara Selandia Baru, Jepang, dan negara yang baru saja meratifikasi yaitu Meksiko. Pada saat Meksiko melakukan ratifikasi perjanjian, terdapat 73 suara yang mendukung, 24 menolak ratifikasi, dan 4 yang tidak memberikan suara (Mexico, first country to ratify the Trans-Pacific Partnership, 2018). Perjanjian kerjasama TPP ini belum dapat berjalan karena masih banyak negara-negara yang belum melakukan ratifikasi perjanjian di negaranya, karena paling tidak dibutuhkan setengah dari negara anggota untuk meratifikasi agar perjanjian dapat berjalan. Dalam melakukan ratifikasi ini dibutuhkan proses yang panjang pada masing-masing negara dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku di negaranya. Jika belum dilakukan ratifikasi

maka perjanjian tersebut belum memiliki kekuatan hukum di negaranya. Negara Selandia Baru, Singapura, dan juga Chili merupakan negara yang menjadi pencetus awal terbentuknya perjanjian TPP ini, ditambah dengan Brunei Darussalam. Masuknya Amerika Serikat dalam keanggotaan TPP menjadikan adanya perubahan besar dalam negosiasi ini, negosiasi menjadi semakin berkembang dengan terus bertambahnya anggota. Negara-negara anggota baru mulai bergabung dalam negosiasi TPP karena ajakan negara yang sebelumnya telah bergabung dengan motif ekonomi sebagai pertimbangannya. Banyak negara-negara anggota yang mengalami pertumbuhan ekonomi di negaranya karena peningkatan nilai ekspor mereka dengan perluasan pangsa pasar sebagai akibat dari kerjasama ini, walaupun kerjasama ini belum resmi berlaku. Sesama negara anggota negosiasi TPP memiliki hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

3. Tujuan Dibentuknya TPP

Dibentuknya negosiasi TPP (*Trans-Pacific Partnership*) ini tentunya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan berbagai keuntungan bagi negara-negara anggotanya. TPP merupakan perjanjian kerjasama dalam hal perdagangan bebas, tentunya tujuan dibentuknya negosiasi ini adalah pertama untuk menghilangkan hambatan dan tantangan sehingga tercapai kemudahan dalam melakukan perdagangan antar sesama negara anggotanya. Kemudahan ini dapat tercapai dengan penghapusan tarif perdagangan. TPP juga memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran ekonomi negara anggotanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi negara-negara anggota dapat tumbuh dikarenakan kerjasama negosiasi TPP dikatakan dapat menguasai 40% dari perdagangan dunia. Dengan demikian dapat

dibayangkan keuntungan yang didapatkan masing-masing negara terutama negara-negara dengan jumlah ekspor yang tinggi. Dalam tujuan mengatasi hambatan dan tantangan perdagangan, TPP mempromosikan inovasi, produktivitas, dan daya saing dengan mengatasi isu-isu baru, termasuk perkembangan ekonomi digital, dan peran perusahaan milik negara dalam ekonomi global (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015). TPP menyediakan akses pasar yang komprehensif dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non tarif pada perdagangan barang dan jasa serta dalam investasi, sehingga menciptakan peluang bagi bisnis, pekerja, dan konsumen.

4. Isu-isu Kerjasama dalam TPP

Negosiasi TPP mempunyai bidang-bidang atau isu-isu kerjasama yang jumlahnya cukup banyak dan telah dibahas dalam tiga puluh bab teks perjanjian TPP. Adapun isu-isu kerjasama TPP adalah dalam bidang perdagangan barang, tekstil dan pakaian, ketentuan asal barang, administrasi kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, ukuran sanitary dan phytosanitary (SPS), hambatan teknis perdagangan (TBT), perbaikan perdagangan, perdagangan lintas batas dalam layanan, jasa keuangan, telekomunikasi, perdagangan elektronik, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, pengadaan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan monopoli yang ditunjuk, buruh, lingkungan, *temporary entry for business persons*, kerjasama dan pengembangan kapasitas, daya saing dan fasilitasi bisnis, pembangunan, usaha kecil dan menengah, peraturan koherensi, transparansi dan anti-korupsi, ketentuan administrasi dan institusional, dan penyelesaian sengketa (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015). Dalam skripsi ini,

penulis hanya akan membahas tiga isu penting dalam kerjasama TPP, diantaranya adalah :

a. Perdagangan Barang

Dalam hal perdagangan, TPP setuju untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non tarif pada barang-barang industri, menghilangkan atau mengurangi tarif dan kebijakan pembatasan lainnya pada barang-barang pertanian. Akses istimewa yang diberikan TPP akan meningkatkan perdagangan diantara negara-negara anggota dan mendukung terciptanya pekerjaan berkualitas tinggi. TPP juga setuju untuk tidak memberlakukan pembatasan dan bea impor dan ekspor dari WTO yang tidak konsisten, termasuk pada barang yang diproduksi ulang. Dalam sektor pertanian, para pihak di TPP akan menghapus atau mengurangi tarif dan kebijakan yang bersifat membatasi, sehingga akan terjadi peningkatan perdagangan pertanian dalam wilayah tersebut dan juga ketahanan pangan akan meningkat. Selain menghilangkan atau mengurangi tarif, Pihak TPP setuju untuk mempromosikan reformasi kebijakan, termasuk dengan menghilangkan subsidi ekspor pertanian, bekerja bersama di WTO untuk mengembangkan disiplin pada perusahaan perdagangan ekspor negara, kredit ekspor, dan membatasi jangka waktu yang diizinkan untuk pembatasan ekspor makanan. sehingga memberikan keamanan pangan yang lebih besar di wilayah tersebut. Para Pihak TPP juga telah sepakat untuk meningkatkan transparansi dan kerjasama pada kegiatan-kegiatan tertentu yang terkait dengan bioteknologi pertanian (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015).

b. Investasi

TPP menetapkan peraturan yang mensyaratkan kebijakan dan perlindungan investasi non-diskriminatif yang menjamin perlindungan hukum aturan dasar, sambil melindungi kemampuan pemerintah para pihak untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah. Pasar di TPP ini terbuka bagi investor asing, kecuali bagi negara yang telah mengambil pengecualian. TPP juga menyediakan untuk arbitrase internasional yang netral dan transparan dari perselisihan investasi, dengan perlindungan yang kuat untuk mencegah klaim yang kejam dan seenaknya serta memastikan hak pemerintah untuk mengatur demi kepentingan publik, termasuk pada kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015).

c. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual ini mencakup paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, bentuk lain dari kekayaan intelektual, dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta area di mana para pihak setuju untuk bekerja sama. Bab ini menetapkan standar untuk paten, berdasarkan Perjanjian TRIPS WTO dan praktik terbaik internasional. Pada merek dagang, ini memberikan perlindungan nama merek dan tanda lain yang digunakan oleh bisnis dan individu untuk membedakan produk mereka di pasar. Dalam hak cipta, TPP menetapkan komitmen yang memerlukan perlindungan untuk karya, pertunjukan, dan rekaman suara seperti lagu, film, buku, dan perangkat lunak, dan mencakup ketentuan yang efektif dan seimbang tentang langkah-langkah perlindungan teknologi dan informasi manajemen hak. Pihak TPP juga setuju

untuk menyediakan sistem penegakan yang kuat, termasuk prosedur perdata, tindakan sementara, tindakan perbatasan, dan prosedur pidana dan hukuman untuk pemalsuan merek dagang skala komersial dan hak cipta atau pembajakan hak terkait (Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, 2015).

B. Dinamika Keikutsertaan Amerika Serikat di TPP

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam negosiasi TPP ini mengalami dinamika yang menarik untuk dicermati terutama jika dilihat pada fase perubahan kepemimpinan yang terjadi di Amerika Serikat dari yang semula dipimpin oleh Presiden Barack Obama kemudian dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang ikut berperan dalam proses awal pembentukan negosiasi TPP ini menunjukkan konsen yang sangat besar terhadap peluang TPP menjadi sebuah organisasi yang bisa diwujudkan dan sebagai wadah untuk kerjasama ekonomi. Sementara Donald Trump yang dilihat dari kampanye-kampanyenya ini cenderung mempunyai sikap yang berbeda dari presiden pendahulunya. Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai Presiden Barack Obama dan Donald Trump untuk menunjukkan dinamika dan perbedaan pandangan keduanya dalam status keanggotaan Amerika Serikat dalam negosiasi TPP.

1. Era Barack Obama

Amerika Serikat mulai tergabung dalam negosiasi ini pada masa pemerintahan Presiden Bush tahun 2008. Pada Februari tahun 2008 Bush mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan bergabung dalam negosiasi TPP yang dahulunya berbentuk P-4 dan masih ditangguhkan pada layanan keuangan dan investasi. Kemudian pada September 2008 barulah Amerika Serikat secara resmi bergabung

dalam P-4 dan mengambil alih kekuasaan dan menggantinya menjadi negosiasi TPP (*Trans-Pacific Partnership*). Dalam laporan tahunan Amerika Serikat tahun 2008 tentang Program Perjanjian Perdagangan, dapat diketahui alasan Amerika Serikat bergabung dalam negosiasi TPP adalah mempromosikan bisnis Amerika Serikat untuk bersaing lebih baik di kawasan Asia Pasifik dan pembangunan beberapa inisiatif integrasi ekonomi regional yang mampu bersaing (Rajamoorthy, *The Origins and Evolution of the TPP*, 2013). Memasuki tahun 2009, Amerika Serikat mengalami pergantian kepemimpinan dari Presiden Bush ke Presiden Barack Obama. Pada saat Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Obama menghadapi kebangkitan kekuatan Tiongkok baik dalam kekuatan ekonomi maupun pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Untuk menghadapi situasi ini maka Obama bergabung dalam negosiasi TPP sebagai upaya pembendungan ekspansi ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik ini. Melalui kebijakan luar negerinya yang dikenal dengan *Pivot to Asia*, Amerika memberikan fokus perhatian lebih kepada kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut. Amerika Serikat mencari kawan sebagai sekutu sebanyak mungkin untuk memberikan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sebagai penangkal komunisme Tiongkok. Adanya krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh Obama juga mendorongnya untuk melakukan kerjasama ekonomi yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi Amerika Serikat. Menurut Presiden Obama, TPP dapat membantu Amerika Serikat untuk memperluas pangsa pasarnya karena lebih dari 95 persen konsumen produk Amerika berasal dari luar perbatasan negara ini.

TPP akan menambah milyaran dolar ke ekonomi Amerika Serikat dan memperkuat komitmen politik, keuangan, dan militer Washington ke Pasifik

selama beberapa dekade kedepan. TPP memiliki peluang lebih baik untuk mengatasi oposisi domestik daripada kesepakatan DOHA atau kesepakatan bilateral baru (Gordon, 2012). Dalam negosiasi TPP ini Amerika Serikat memainkan peranan yang penting, dimana negara-negara lain mau bergabung dengan negosiasi ini karena adanya Amerika Serikat sebagai daya pikat negara lain. Sebelum adanya Amerika Serikat yang tergabung dalam negosiasi ini, kerjasama ini hanya berskala kecil beranggotakan empat negara. Ketika Amerika Serikat masuk, Amerika mampu mengajak negara besar seperti Jepang, Australia, Kanada untuk bergabung dalam negosiasi TPP, dan juga negara Amerika Latin seperti Peru dan Meksiko, serta negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan juga Malaysia. Amerika Serikat sebagai negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dapat dijadikan pasar yang strategis bagi negara-negara anggota lain untuk produk ekspornya. Begitu juga sebaliknya, negara-negara Amerika Latin dan juga negara di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Amerika Serikat itu sendiri, sehingga tercipta hubungan yang menguntungkan antar sesama anggota negosiasi TPP. Amerika Serikat saat bergabung dalam TPP seperti memberikan harapan baru bagi negosiasi ini dengan melakukan perubahan total, dimana yang semula bernama P-4 dengan empat anggota berubah menjadi negosiasi *Trans-Pacific Partnership* dengan dua belas negara anggota dan terus melakukan perundingan hingga tercapai kesepakatan akhirnya. Mungkin tanpa bantuan dari negara Amerika Serikat, perjanjian kerjasama P-4 ini tidak akan mengalami kemajuan yang pesat karena negara-negara pendahulunya tidak memiliki power yang besar untuk merekrut negara-negara anggota baru. Dengan demikian, Amerika Serikat dengan perekonomian

yang kuat di dunia mampu memberikan pengaruh besar bagi jalannya negosiasi TPP.

Untuk Amerika Serikat sendiri, melalui negosiasi TPP ini Presiden Barack Obama akan menulis ulang aturan perdagangan yang akan memberikan keuntungan bagi kelas menengah di Amerika Serikat. Presiden Obama berkomitmen bahwa kebijakan perdagangan tidak hanya mendukung ekonomi Amerika Serikat tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dari Amerika itu sendiri (The Trans-Pacific Partnership). TPP akan memiliki dampak besar pada bagaimana Amerika membantu perluasan usaha kecil, mendukung wirausahawan online yang baru saja lepas landas, mempromosikan kesetaraan gender untuk wanita, berinvestasi di negara berkembang, melindungi spesies yang paling terancam, dan membuat kemajuan besar dalam memperjuangkan hak asasi manusia (*ibid*). Obama melihat banyaknya dampak positif yang akan TPP berikan untuk Amerika Serikat sehingga ia terus berupaya memberikan kontribusinya pada negosiasi ini.

2. Era Donald Trump

Donald Trump merupakan presiden terpilih Amerika Serikat yang berasal dari partai politik Republik untuk menggantikan Presiden Barack Obama pada pemilu tahun 2016. Pada saat pemilihan umum ini Trump menghadapi lawan politiknya yaitu Hillary Clinton yang berasal dari Partai Demokrat. Donald Trump yang berasal dari Partai Republik ini lebih banyak mendapatkan dukungan dari kalangan pengusaha dan profesional dibandingkan partai Demokrat (Cipto, 2003, p. 59). Sama halnya dengan Trump sendiri, ia merupakan seorang pengusaha *real estate* yang sukses di Amerika Serikat dan seorang bintang di televisi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump lebih berkomitmen untuk fokus

pada kepentingan dan keamanan Amerika Serikat dengan “*America First*” sebagai tema utama dalam kampanye politiknya yang kemudian menjadi doktrin politik luar negeri pada pemerintahannya saat ini. Yang dimaksud dengan “*America First*” adalah kebijakan yang dibuat Trump khususnya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menekankan pada semangat nasionalisme dan anti intervensi. Donald Trump juga mempunyai slogan kampanyenya yang berbunyi “*Make America Great Again*” yang selalu ia sampaikan pada setiap pidatonya. Pemerintahan Trump ingin membangkitkan kembali ekonomi Amerika Serikat dengan membawa pulang lapangan pekerjaan serta industri kembali berpusat di Amerika. Saat Donald Trump melakukan kampanye di Michigan dan juga Florida, ia menyampaikan pesannya mengenai pemberdayaan ekonomi untuk seluruh masyarakat Amerika Serikat. Trump juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan kemakmuran pada rakyatnya melalui *tax code* yang direformasi, lingkungan peraturan yang lebih baik, dan kesepakatan perdagangan yang lebih baik (Donald J. Trump). Amerika Serikat akan menindak negara-negara yang melanggar perjanjian perdagangan dan merugikan pekerja Amerika dalam prosesnya.

Dalam kampanye pemilihan presiden Donald Trump telah membuat banyak kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dari presiden pendahulunya Barack Obama. Adapun beberapa fokus janji kampanye Donald Trump pada saat itu adalah penurunan tarif pajak bisnis, potongan pajak yang diberikan untuk semua orang, pembangunan tembok raksasa sebagai pembatas antara Meksiko dengan Amerika Serikat, adanya larangan masuk bagi orang-orang yang berasal dari negara-negara yang rawan terjadinya terorisme. Dilihat dari kebijakan-kebijakan

tersebut, Trump seperti ingin melakukan politik isolasionisme untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman dunia luar dan fokus pada masalah dalam negerinya. Donald Trump juga membuat kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan Barack Obama yaitu dalam hal kesehatan, Trump ingin membatalkan *Obamacare*. *Obamacare* merupakan sebuah undang-undang yang berisi kebijakan untuk memberikan asuransi kesehatan bagi warga Amerika Serikat yang tidak mampu serta untuk memperbaiki hasil layanan kesehatan dan menyederhanakan penyaluran layanan kesehatan. Selain dalam hal kesehatan, Trump juga membuat kebijakan yang menentang Obama dalam hal ekonomi dimana Trump membuat keputusan untuk melakukan penarikan Amerika Serikat dari negosiasi TPP. Penarikan Amerika Serikat ini sebagai bukti nyata dari komitmen yang Trump buat saat kampanye yaitu untuk menciptakan kesepakatan perdagangan yang lebih baik dan membawa keuntungan bagi Amerika Serikat. Saat Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-45, Trump melakukan langkah kongkrit untuk memenuhi janji kampanyenya dengan menandatangani perintah eksekutif penarikan diri dari keanggotaan TPP di kantor Oval pada Januari 2017 (Mui, 2017). Amerika Serikat mengirim surat penarikan diri dari negosiasi TPP kepada negara-negara seluruh anggota TPP dan juga *depository* yang berada di Selandia Baru. Donald Trump memandang bahwa negosiasi TPP ini menjadi sebuah ancaman bagi negara Amerika Serikat dengan masuknya buruh dengan upah yang rendah dari negara Vietnam dan juga Malaysia. Banyak tulisan negatif mengenai pandangan Trump yang ia tulis dalam akun sosial media pribadinya. Tulisan tersebut berisi bahwa menurut Trump TPP merupakan sebuah serangan bagi bisnis di Amerika Serikat, negosiasi ini merupakan transaksi yang buruk karena tidak menghentikan

manipulasi nilai tukar mata uang Jepang. Trump juga berpendapat bahwa Kemitraan Trans-Pasifik akan meningkatkan defisit perdagangan di Amerika Serikat dan negosiasi TPP Ini adalah transaksi yang buruk karena mengirimkan lebih banyak lagi pekerjaan ke luar negeri bukan untuk rakyat Amerika, sehingga Trump menginginkan perdagangan yang lebih cerdas.

Kesimpulan dari bab tiga ini menemukan bahwa negosiasi TPP ini menjadi sebuah rancangan organisasi perdagangan yang memiliki potensi yang sangat kuat di dunia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam negosiasi ini juga menjadi pemicu negara lain untuk bergabung dalam negosiasi TPP ini. Namun, pergantian kepemimpinan Amerika Serikat ini menimbulkan perubahan arah terbangunnya TPP seperti yang telah dicita-citakan. Apalagi pada saat pemerintahan Donald Trump yang berbeda dengan pemerintahan Barack Obama, era kepemimpinan Trump menunjukkan komitmen yang semakin melemah bahkan adanya keinginan untuk keluar yang berpotensi untuk membubarkan negosiasi TPP ini sendiri. Hal ini menjadi menarik untuk mengkaji latar belakang keluarnya Donald Trump dari negosiasi TPP yang selama ini dianggap sebagai alternatif cara untuk menumbuhkan ekonomi Amerika Serikat maupun dunia dimana hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya.